



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) Tahun 2021



DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN
PROVINSI DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat tersusun, sebagai bahan pertanggungjawaban akuntabilitas pencapaian *outcome*, program, kegiatan dan anggaran Tahun 2021 sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *outcome* maupun *ouput* yang berkelanjutan.

LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ini akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 27 Januari 2022

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta



Suharini Eliawati
NIP 196810011995032005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.2.1. Kedudukan	2
1.2.2. Tugas	2
1.2.3. Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)	10
1.5. Sistematika Penyajian	15
II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	18
2.1. Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta	19
2.1.1. Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022	19
2.1.2. Misi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022	20
2.1.3. Tujuan	20
2.1.4. Sasaran	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	26
2.4. Instrumen Pendukung	27
III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.1.1. Target Capaian Akuntabilitas Organisasi	30
3.1.2. Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi	31
3.1.3. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya	39
3.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.5. Perbandingan Dengan Target Nasional	42
3.2. Realisasi Anggaran	43

IV	Penutup	48
4.1.	Kesimpulan	48
4.2.	Rencana Tindak Lanjut	48

Lampiran:

1. Capaian IKU RPJMD 2021;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
3. Piagam Penghargaan;

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.1	Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Kerja	10
1.2	Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Golongan	11
1.3	Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Jabatan	12
1.4	Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan	13
1.5	Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2020 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	14
1.6	Rekapitulasi Jumlah PJLP	14
2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	21
2.2	Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2021	24
2.3	Alokasi Anggaran Penetapan dan Perubahan Belanja Per Program Tahun 2021	26
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
3.2	Target Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021	31
3.3	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama	31
3.4	Program pendukung capaian IKU 2	33
3.5	Renaksi KSD Pendukung IKU 2	34
3.6	Rincian Capaian IKU 2 Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitas	35
3.7	Program Pendukung IKU 3 Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitas	36
3.8	Renaksi KSD Pendukung IKU 3 Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitas	36
3.9	Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	38
3.10	Perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	38
3.11	Sub Kegiatan Pendukung IKU 4 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	38

3.12	Perjanjian Kinerja Penunjang IKU	39
3.13	Capaian IKU sesuai capaian RPJMD	40
3.14	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.15	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja	41
3.16	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020 beberapa Daerah di Indonesia	42
3.17	Realisasi Anggaran Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020	43
3.18	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021	43
3.19	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020	44
3.20	Program Penunjang Sasaran Strategis	45

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada Revisi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mengemban 4 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai Sasaran Strategis yaitu :

- 1) Indeks Ketahanan pangan
- 2) Neraca Bahan Makanan
- 3) Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi
- 4) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dari 4 Indikator tersebut, semua sudah mencapai target. Rincian pencapaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	REALISASI	Capaian (%)
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70	78,89	110
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan	Persentase	100	100	100
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Luas (Ha)	144,2	196,02	110
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	93,02	102.21

Realisasi anggaran APBD Perubahan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 mencapai Rp 463.557.423.650,- (51,67%) dari anggaran Rp 897.126.578.788,- yang terdiri dari 12 program dan 13 UKPD.

Memperhatikan capaian dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- ✓ Mengusulkan revisi Pergub No. 46 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.
- ✓ Meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.



BAB 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di DKI Jakarta diarahkan pada berbagai sektor untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kapasitas ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup. Pembangunan sektor ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem perekonomian DKI Jakarta.

Terdapat berbagai tantangan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terutama karena berkedudukan di ibukota negara, tantangan ke depan adalah mengendalikan ketersediaan bahan pangan baik produksi pertanian dan hortikultura, peternakan, maupun kelautan dan perikanan, berupa produk dasar maupun produk olahan. Selain ketersediaan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tanggung jawab untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang beredar dalam Kota Jakarta.

Dalam urusan lingkungan hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai tantangan berupa pelestarian sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Sedangkan peluang di sektor kelautan dan perikanan dimana luas laut 6.997,5 km² jauh lebih luas dibandingkan dengan luas daratan 661,52 km² perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan Jakarta. Potensi kelautan dan perikanan yang ada sekarang perlu ditransformasi dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Tantangan dan peluang di atas tentu harus direspon dengan baik dengan mengimplementasikan berbagai macam strategi, program dan kegiatan.

Pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan secara sinergis harus dilakukan. Kondisi ini dapat diciptakan antara lain melalui pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan dengan penataan kelembagaan, perbaikan mekanisme kerja organisasi, penataan sumber daya aparatur, dan peningkatan kompetensi aparatur dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang lebih spesifik. Penataan kelembagaan telah dilakukan pada awal Januari 2017 ini yaitu dengan restrukturisasi organisasi pada lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

1.2.1. Kedudukan

Pelaksanaan tugas organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

1.2.2. Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan.

1.2.3. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DKPKP;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DKPKP;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pembangunan pengembangan dan pembinaan kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pengendalian kesehatan hewan, ikan dan tanaman;
- f. perlindungan sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- g. pengembangan teknologi kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. perlindungan masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, ikan dan tanaman;
- i. pemantauan dan pengendalian distribusi, ketersediaan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dalam rangka ketahanan pangan;
- j. pengelolaan sistem informasi rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. fasilitasi pemasaran hasil rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- l. pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- m. fasilitasi pengembangan kerjasama antar komunitas usaha ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. penyelenggaraan standarisasi di bidang kegiatan rumpun urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- o. konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, pulau-pulau kecil;

- p. pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- q. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- s. pengawasan dan pengendalian izin di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- t. pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- v. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang DKPKP;
- w. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DKPKP;
- x. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DKPKP; dan
- y. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP.

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, susunan lengkapnya sebagai berikut:

A. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 4. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Kelautan, terdiri dari :
1. Seksi Tata Kelola Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil;
 2. Seksi Pendayagunaan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari :
1. Seksi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Pertanian, terdiri dari :
1. Seksi Pertanian Perkotaan;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 3. Seksi Pengendalian Mutu dan Agribisnis.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
1. Seksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Kesehatan Hewan

B. Suku Dinas lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi Suku Dinas Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari:
 1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Seksi Perikanan;
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- b. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari:
 1. Kepala Suku Dinas;
 2. Subbagian Tata Usaha ;
 3. Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 4. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Seksi Kelautan dan Perikanan;
 6. Subkelompok Jabatan Fungsional

- c. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Seksi Pertanian.
 3. Seksi Kehutanan.
 4. Seksi Ketahanan Pangan.
 5. Sub Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Seksi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kecamatan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Susunan Organisasi UPT Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

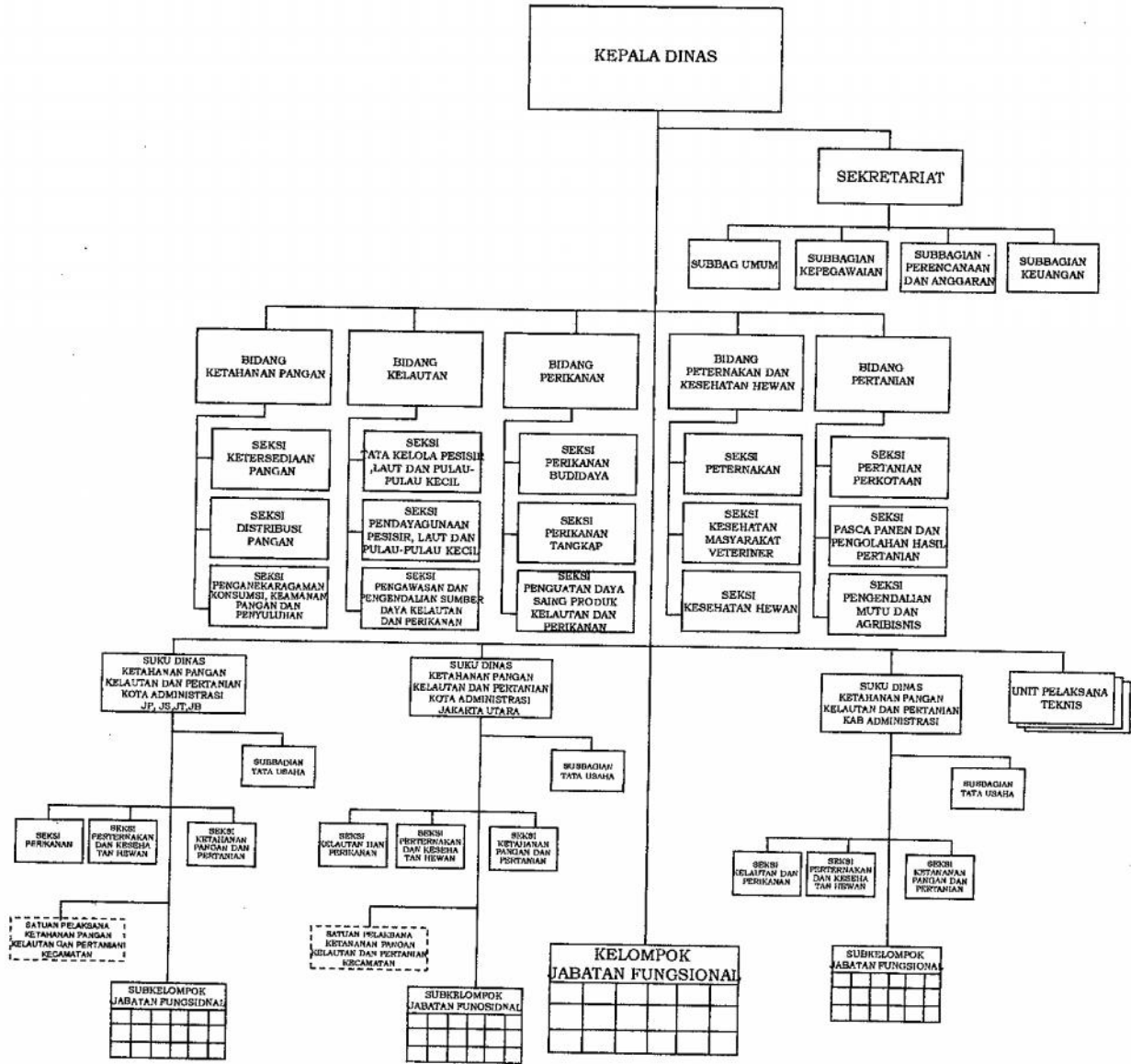
- a. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman
 - 4. Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman.
 - 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- b. Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian.
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian
 - 4. Satuan Pelaksana Sertifikasi Hasil Pertanian.
 - 5. Subkelompok Jabatan Fungsional. c.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

- 1. Kepala Unit
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan
 - 4. Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan.
 - 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- d. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran
 - 4. Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
 - 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.
 - 1. Kepala Pusat
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 - 3. Subbagian Keuangan
 - 4. Satuan Pelaksana Kesehatan Hewan
 - 5. Satuan Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 6. Satuan Pelaksana Usaha dan Promosi Peternakan
 - 7. Satuan Pelaksana Rumah Potong Hewan

8. Satuan Pengawas Internal
 9. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- f. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
1. Kepala Pusat
 2. Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Satuan Pelaksana Budidaya Laut
 4. Satuan Pelaksana Konservasi Laut.
 5. Subkelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

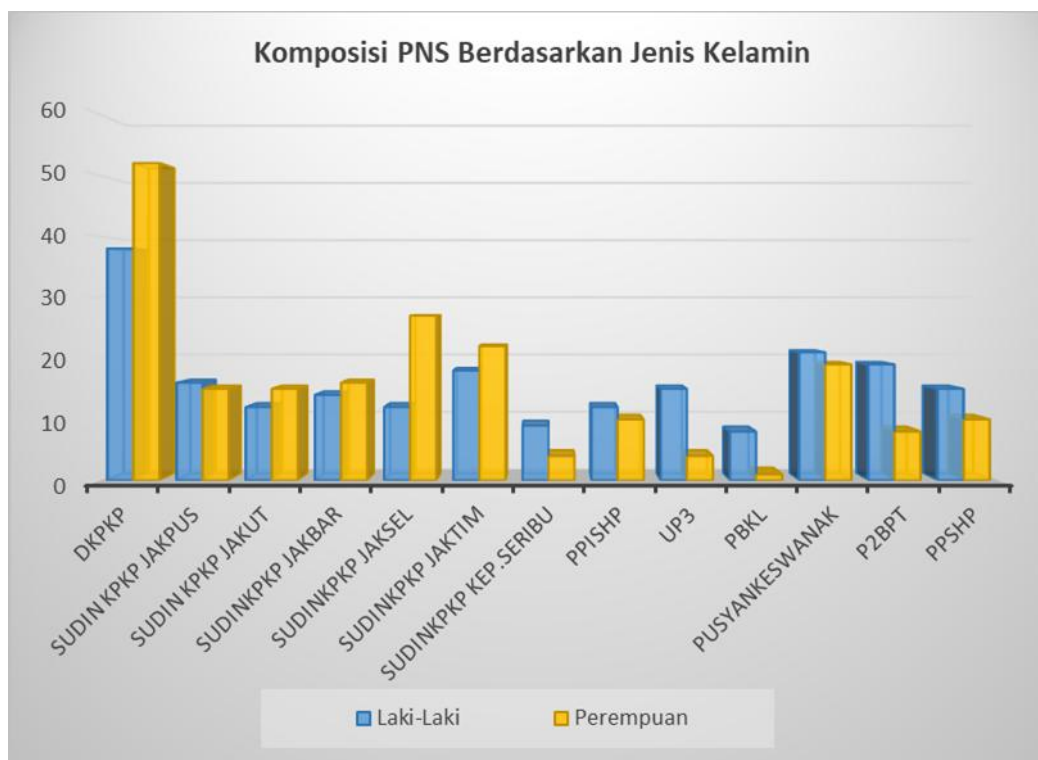
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Berdasarkan data statistik per bulan Desember tahun 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebanyak 411 orang yang berada di Dinas, Suku Dinas dan UPT. Seluruh Pegawai Negeri Sipil tersebut berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda dari tingkat SD sampai tingkat Pasca Sarjana (S2), dengan pangkat golongan dari I/B sampai dengan IV/C. Adapun gambaran umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Suku Dinas dan UPT Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lokasi Kerja

NO	LOKASI KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH PNS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	38	52	90
2	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	16	15	31
3	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	12	15	27
4	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	14	16	30
5	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	12	27	39
6	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	18	22	40
7	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	9	4	13
8	PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN	12	10	22
9	UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN	15	4	19
10	PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT	8	1	9
11	PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN	21	19	40
12	PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN	19	8	27
13	PUSAT PROMOSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN	15	10	25
	TOTAL	209	203	412

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

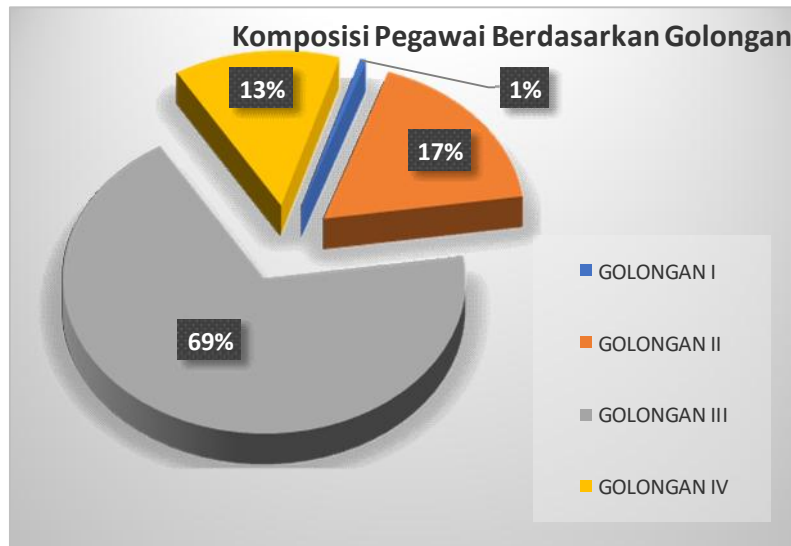


(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE (%)
1	GOLONGAN IV	55	13.35
2	GOLONGAN III	283	68.69
3	GOLONGAN II	72	17.48
4	GOLONGAN I	2	0.49
	TOTAL	412	100.00

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

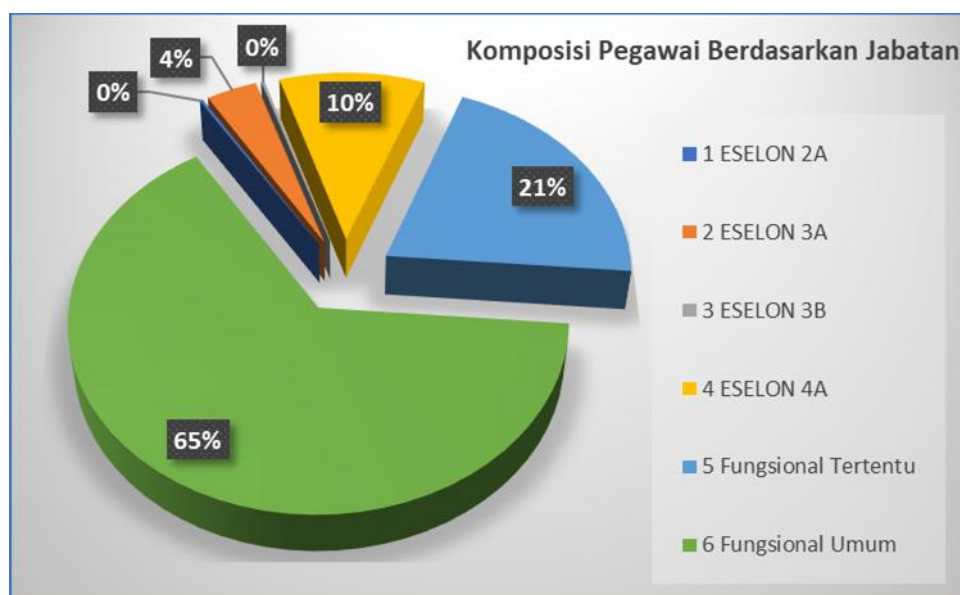


(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE (%)
1	ESELON 2A	1	0.24
2	ESELON 3A	15	3.64
3	ESELON 3B	1	0.24
4	ESELON 4A	43	10.44
5	Fungsional Tertentu	85	20.63
6	Fungsional Umum	267	64.81
	TOTAL	412	100.00

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

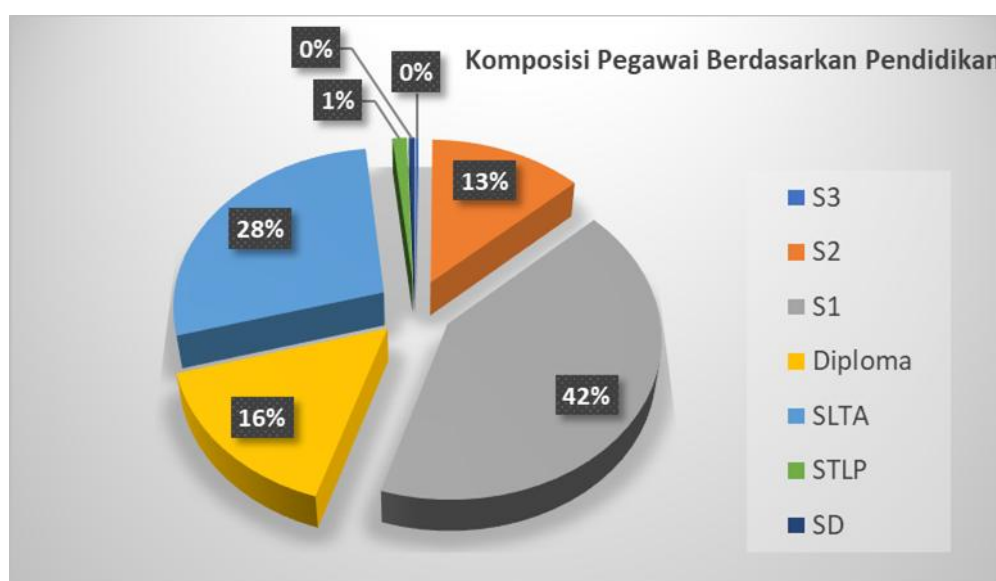


(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	PERSENTASE (%)
1	S3	1	0.24
2	S2	53	12.86
3	S1	172	41.75
4	Diploma	65	15.78
5	SMA	114	27.67
6	SMP	5	1.21
7	SD	2	0.49
	TOTAL	412	100.00

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)



(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian antara lain dari kelompok rumpun ilmu hayat baik dari sektor pertanian, peternakan serta perikanan. Adapun jenis Jabatan Fungsional Tertentu dan jumlah pegawai dalam JFT seperti table berikut:

Tabel 1.5 Rekapitulasi Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2020 Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH JFT
1	MEDIK VETERINER	6
2	PARAMEDIK VETERINER	12
3	PENGAWAS BENIH TANAMAN	6
4	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	12
5	PENGAWAS PERIKANAN	8
6	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	3
7	PENYULUH PERTANIAN	38
	TOTAL	85

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas operasional, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian juga didukung oleh tenaga non-PNS yaitu Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang berjumlah ± 1.089 orang yang meliputi PJLP Teknis dan Non Teknis yang terdapat pada Dinas, Sudin dan UPT dengan rincian seperti table berikut.

Tabel 1.6 Rekapitulasi Jumlah PJLP

NO	JENIS PJLP	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1	PJLP TEKNIS	578	Tenaga PJLP meliputi Petugas Lapangan dan Pendamping Kewirausahaan Terpadu (PKT)
2	PJLP NON TEKNIS	511	Petugas Kebersihan, Keamanan, dan Mekanikal elektrik
	TOTAL	1,089	

(Sumber : Subbagian Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2020 meliputi RPJMD 2017-2022, Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2017-2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020, menjelaskan capaian kinerja organisasi selama tahun 2020 beserta analisisnya dan realisasi anggaran Tahun 2020.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Mekanisme penyusunan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian melalui metode pengumpulan data dari tiap UKPD, pengukuran kinerja dari data yang dikirimkan, verifikasi capaian kinerja dari tiap data indikator kinerja utama yang sesuai dengan sasaran strategis organisasi untuk memperoleh

keandalan informasi, serta penelaahan analisis tiap-tiap sasaran strategis yang ditampilkan dalam laporan kinerja ini oleh pejabat pada masing-masing sektor yang terkait. Sedangkan penanggungjawab pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas berada pada Sekretaris Dinas, khususnya di Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.

BAB

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Program Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta berbasis kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017- 2022 yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) sebagai bentuk kontrak kerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Setiap program dan kegiatan dalam Renstra dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Indikator kinerja sebaiknya memenuhi kelima karakteristik kualitatif tersebut sehingga keberhasilan pencapaian program dan kegiatan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang disusun menggunakan pendekatan partisipatif dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam setiap pelaksanaan sasaran strategis, program, dan/atau kegiatan

2.1. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2017-2022

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta terikat pada Perjanjian Kinerja yang dijadikan tolak ukur untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satu tahun perencanaan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Jakarta saat ini dengan memperhatikan potensi dan permasalahan peningkatan ketahanan pangan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022), Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur terpilih yaitu

2.1.1 Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan DKI Jakarta 2017–2022 adalah:

” Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua ”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
2. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang maju, lestari dan berbudaya.
3. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan.

4. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka mewujudkan keberadaban, keadilan dan sejahtera bagi semua.

2.1.2. Misi Pembangunan DKI Jakarta 2017-2022

Demi mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan Misi Gubernur sebagaimana berikut:

1. **Misi 2** : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
2. **Misi 4** : Menjadikan Jakarta kota lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Kinerja SKPD dalam sakip tahun 2021 terdapat 2 tujuan meliputi :

1. Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan;
2. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari;

2.1.4 Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan terkendali dan terarah, maka sasaran SKPD dalam Sakip Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1. Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat;
2. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel;

Tujuan dan sasaran tersebut di atas dirumuskan dan tersaji dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan	66.31	66.87	67.43	70	76
		Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan				100%	100%
			persentase ketersediaan pangan	100%	100%	100%		
		Terpenuhinya keragaman dan kecukupan gizi dari setiap kelompok pangan	Skor Pola Pangan Harapan	81	82	83	84	85
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel				91%	91%
2.	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari		Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	140.9 Ha	141.9 Ha	143.2 Ha	144.2 Ha	145.2 Ha
		Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi				144,2 Ha	145,2 Ha

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja per Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
		Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Jumlah luas kawasan yang dikelola untuk konservasi dan rehabilitasi	0	1 Ha	1,3 Ha	1 Ha	1 Ha
	Mewujudkan konservasi ekologi laut Jakarta yang berkelanjutan melalui rehabilitasi terumbu karang, fish shelter, penanaman mangrove, padang lamun, pembentukan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat, pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	141 Ha	142 Ha	142,4 Ha		
	Mewujudkan sarana dan prasarana yang terbaik dalam menunjang semua program dan aktivitas ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, serta peternakan dan kesehatan hewan.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			100%		

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah membuat penetapan kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian 2017- 2022 serta RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam renstra tahun 2017-2022.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Sasaran	Target	Satuan
SASARAN STRATEGIS					
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	70	Indeks
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Neraca Bahan Makanan	100%	Persentase
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota berkelanjutan dan lestari	1	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	144,2	Luas (Ha)
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persentase
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Interaktif (nomor 12)	100	Persentase
6	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (nomor 15)	100%	Persentase
7	Meningkatnya kewirausahaan baru	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	Persentase
8	Meningkatnya akses sanitasi layak	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%	Persentase
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	Persentase
10	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi (nomor 46)	100%	Persentase
		2	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Pengelolaan kawasan pesisir teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem pesisir Jakarta termasuk audit lingkungan pulau reklamasi (nomor 53)	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase capaian rencana aksi peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase capaian penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	Persentase
13	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim nomor (72)	100%	Persentase

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Sasaran	Target	Satuan
SASARAN KHUSUS					
14	Terpantaunya harga pangan strategis	1	Indeks Harga Konsumen (volatile food)	133	Sesuai target dengan periode rilis report dari BPS) -target diisi setiap triwulan
15	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	1	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	8	Paket
16	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	3 (WTP)	WTP
18	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	Persentase
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	Predikat
20	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB	92	Nilai
21	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	1	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	35,538,000,000	Rupiah
21	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	1	Persentase capaian omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	100	Persen

NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Sasaran	Target	Satuan
SASARAN OPERASIONAL					
22	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persentase
23	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Indeks
24	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persentase

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

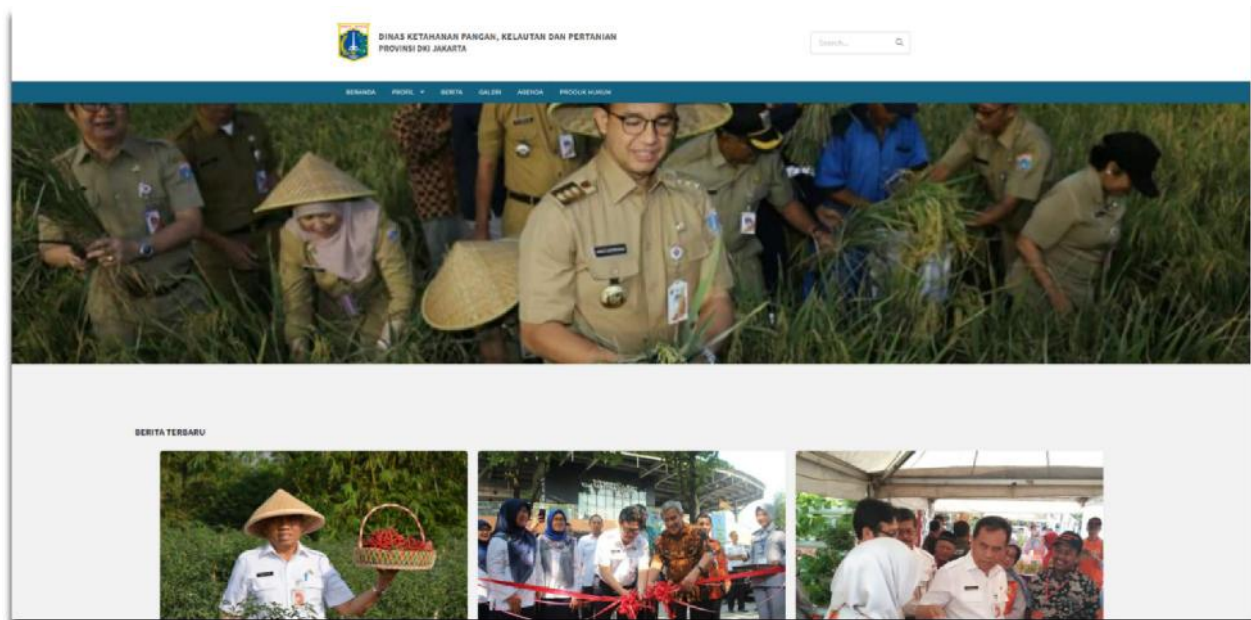
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta didukung oleh anggaran belanja program yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan rekapitan s.d. akhir bulan Desember tahun 2021, total alokasi belanja program sebanyak 14 program sesuai DPA Penetapan Dinas, Sudin dan UPT adalah sebesar Rp. 418.645.895.062,- (Empat Ratus Delapan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) dan DPA Perubahan sebesar Rp. 897.126.578.788,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Ditahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian mendapatkan tambahan anggaran Subsidi Pangan sebesar Rp. 605.610.000.000,- (Enam Ratus Lima Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta) untuk kebutuhan subsidi pangan selama 6 bulan. Alokasi anggaran penetapan dan perubahan belanja per program tahun 2020 (termasuk anggaran Subsidi Pangan) ditunjukkan pada Tabel 1.6 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Penetapan dan Perubahan Belanja Per Program Tahun 2021

NO.	PROGRAM	DPA PENETAPAN	DPA PERUBAHAN
1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,555,401,969	1,157,463,747
2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	698,051,294	104,421,268
3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	11,813,206,726	889,481,417
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7,927,864,481	5,140,854,968
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2,443,773,410	0
6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	242,190,795	60,252,500
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2,816,490,542	1,356,569,831
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1,469,543,711	86,981,000
9	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	44,413,253,480	606,785,380,440
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	314,712,399,225	274,653,425,509
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	25,083,994,081	5,268,379,255
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,563,668,376	1,243,407,154
13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,906,056,972	379,961,699
	TOTAL	418,645,895,062	897,126,578,788

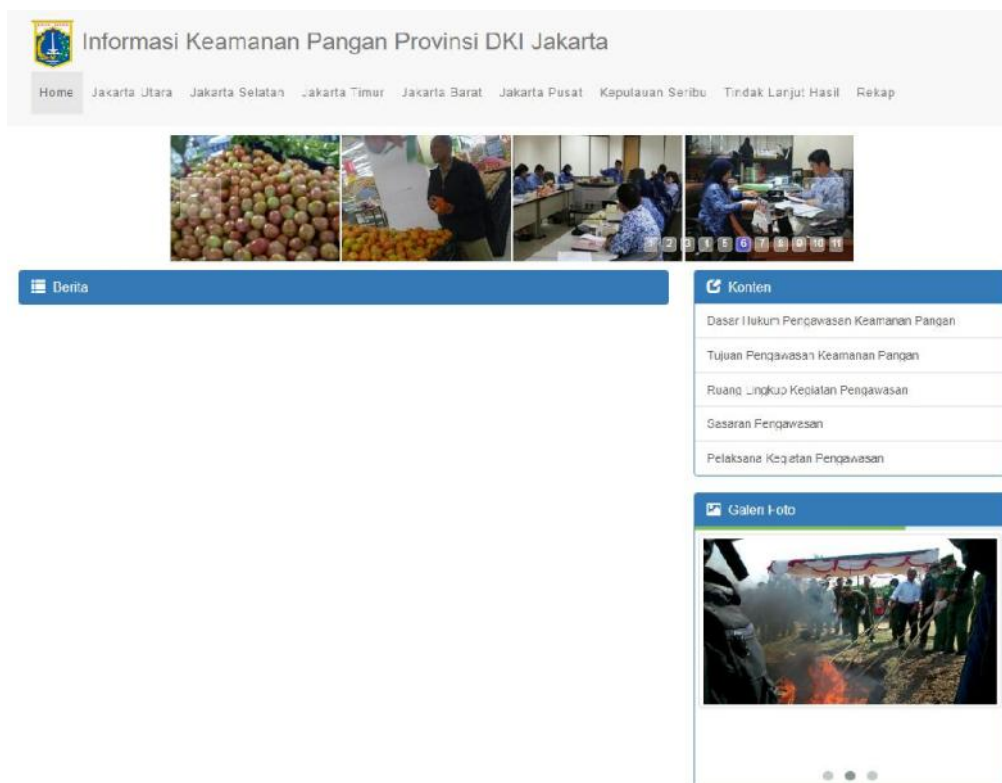
2.4 Instrumen Pendukung

Instrumen pendukung berupa situs yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dengan alamat <http://dkpkp.jakarta.go.id>



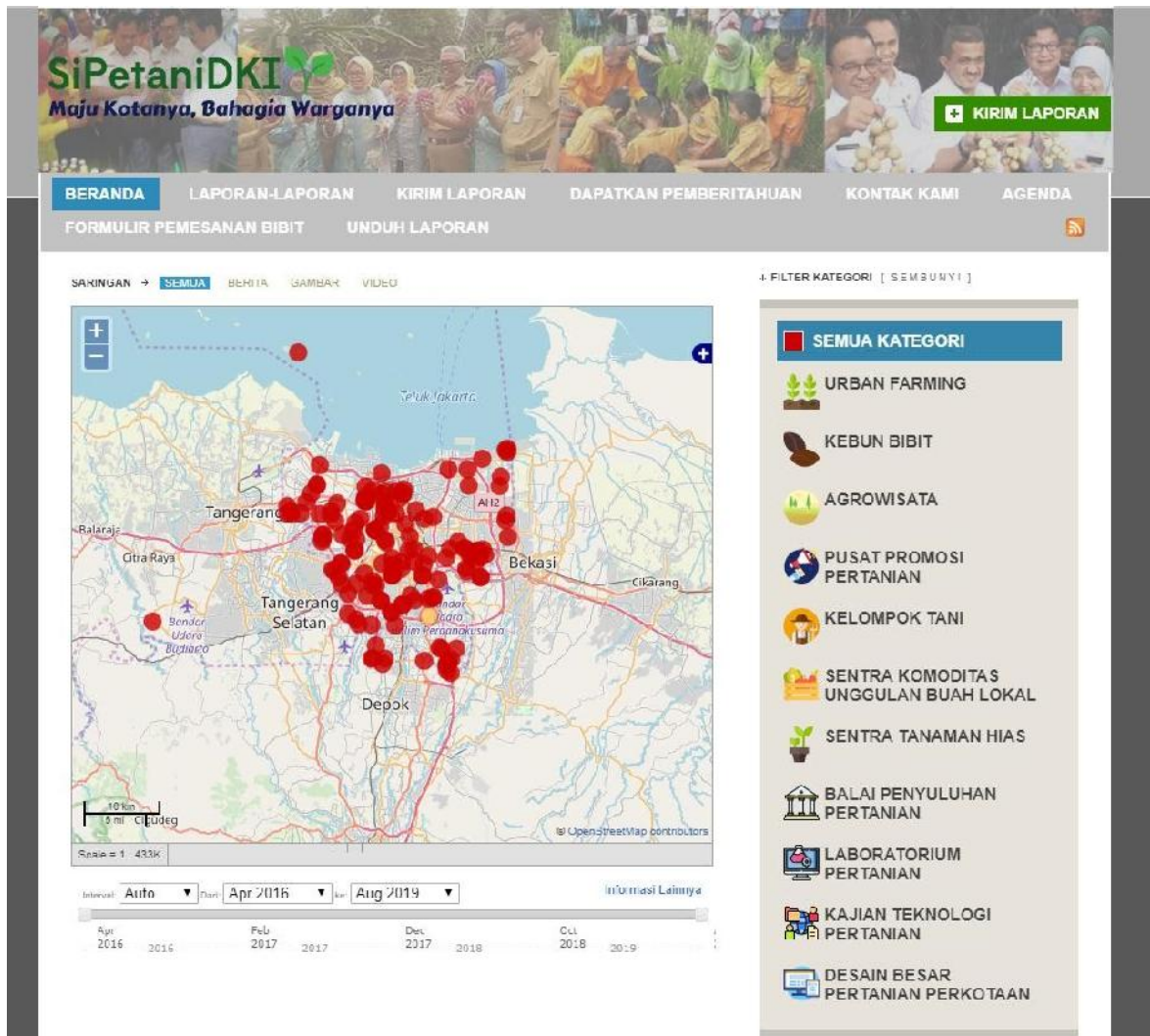
sedangkan aplikasi yang dikelola oleh Aplikasi :

1. Ketahanan Pangan Jakarta : <https://ketahananpangandki.com/>



2. Sistem Informas Petani DKI Jakarta :

<https://balkotfarm.jakarta.go.id/sipetanidki/>



BAB

Akuntabilitas Kinerja

3



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel. 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 100	Sangat Tinggi	
2	76 90	Tinggi	
3	66 75	Sedang	
4	51 65	Rendah	
5	50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1.1 Target Capaian Akuntabilitas Organisasi

Terkait dengan target perjanjian kinerja organisasi pada Perangkat Daerah Tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mempunyai Perjanjian Kinerja dengan beberapa indikator seperti table 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Target Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	70	Indeks
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan	100	Persentase
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	144,2	Luas (Ha)
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	Persentase

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Tahun 2021 terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama meliputi 2 indikator level tujuan SKPD dan 2 indikator pada level sasaran SKPD.

3.1.2 Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Tabel. 3.3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	REALISASI	Capaian (%)
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70	78,89	110
2	Neraca Bahan Makanan	Persentase	100	100	100
3	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Luas (Ha)	144,2	196,02	110
4	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase	91	93,02	102.21

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing iku, terdiri dari :

a. Capaian IKU 1 (Indeks Ketahanan Pangan)

Indikator Kinerja Utama 1 berupa Indeks Ketahanan Pangan merupakan level Tujuan SKPD dengan target sebesar 70 dan realisasi sebesar 78,89 atau capaian sebesar 110 %. Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini didukung oleh kinerja sasaran dan program. Adapun level sasaran yang mendukung keberhasilan IKU tersebut adalah

- 1) Neraca Bahan Makanan
- 2) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. Capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 sebesar 78,89 termasuk dalam kategori kelompok IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan yang berarti bahwa pada tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan sangat tahan pangan sesuai klasifikasi IKP sebagai berikut:

- IKP 1 : <37,61 ; sangat rentan pangan
- IKP 2 : >37,61 - 48,27 ; rentan pangan
- IKP 3 : >48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan
- IKP 4 : >57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan
- IKP 5 : >65,96 - 74,40 ; tahan pangan
- IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan

b. Capaian IKU 2 (Neraca Bahan Makanan)

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat untuk mengetahui kondisi penyediaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah baik lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Negara. Neraca Bahan Makanan (NBM) memuat informasi mengenai produksi pangan, stok pangan, ekspor impor, pangan, penggunaan untuk industri dan non industri hingga pakan, bibit, serta pangan tercecer. Dengan melalui analisis NBM maka dapat dianalisis apakah suatu pangan yang tersedia di suatu wilayah sudah mencukupi sesuai dengan standar Quantity dan Quality.

Indikator Kinerja Utama 2 berupa Neraca Bahan Makanan pada tahun 2021 dengan target 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen. Keberhasilan capaian IKU

2 tersebut didukung oleh 9 program yang diampu oleh seluruh UKPD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) no 15 yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi, Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan. Adapun program yang mendukung capaian IKU 1 seperti tabel 3.4.

Tabel 3.4 Program pendukung capaian IKU 2 Neraca Bahan Makanan

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	606,785,380,440	186,922,362,183	30.81
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,157,463,747	1,134,988,933	98.06
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5,140,854,968	4,728,544,361	91.98
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	86,981,000	85,181,000	97.93
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,243,407,154	1,236,383,340	99.44
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,268,379,255	4,440,236,266	84.28
7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,356,569,831	1,299,600,996	95.80
8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60,252,500	60,038,000	99.64
9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	379,961,699	358,253,360	94.29

KSD yang mendukung IKU NBM adalah KSD 15 yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendistribusian Subsidi pangan, Optimasi, Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan dan Pemenuhan Pasokan Pangan terdiri dari 6 rencana aksi dengan capaian seperti table berikut:

Tabel 3.5 Renaksi KSD Pendukung IKU 2 Neraca Bahan Makanan

KSD	NAMA	RENAKSI	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	
KSD 15	Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis IT Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimasi, Pengelolaan Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan	1	Operasional Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP)	100	100
		2	Pemenuhan Pasokan Pangan	100	100
		3	Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu	100	100
		4	Pelatihan Juru Sembelih Halal	100	100
		5	Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerja Sama penyediaan pangan dengan Pemerintah Daerah lain	100	100
		6	Pendistribusian Subsidi Pangan	100	100

c. Capaian IKU 3 (Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi)

Indikator Kinerja Utama 3 adalah Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi). Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi dengan cara transplantasi karang, penenggelaman fish shelter, penetapan DPL-BM sebagai Kawasan Konservasi (Zona Inti), dan penanaman mangrove.

Tabel 3.6. Rincian Capaian IKU 2 Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi

No	Nama Kegiatan	Stackholder Terkait	Luas/Jumlah
1	Kolaborasi transplantasi karang	DKPKP, PBKL, SDKPKP Kep1000, DPL-BM Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Pari, Pulau Harapan, Karang Taruna Pulau Untung Jawa dan Swasta	0,56 ha (setara 11.200 tangkai karang)
2	Kolaborasi Pembibitan Terumbu Karang di Kebun Bibit Pulau Tidung	DKPKP, PBKL dan DPL-BM Pulau Tidung	0,6 ha (setara 12.000 tangkai karang)
3	Luasan 6 DPL-BM sampai dengan 2020	DPL-BM Kepulauan Seribu Utara dan Kepulauan Seribu Selatan	83 ha
4	Luasan Konservasi melalui transplantasi karang sampai tahun 2020	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	53,16 ha setara 1,063.200 tangkai karang
	Luasan Konservasi melalui fish shelter sampai tahun 2020	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	22,20 ha setara 2.220 unit fish shelter
5	Luasan Konservasi melalui Pembibitan dan Penanaman Mangrove sampai 2020	DKPKP, PBKL, SDKPKP Kep.1000, Perguruan Tinggi, pemerintah dan masyarakat	22,50 ha setara 112.500 pohon mangrove
6	Luasan Konservasi melalui Pembibitan dan Penanaman Mangrove di tahun 2021	DKPKP, PBKL, SDKPKP Kep.1000, Perguruan Tinggi, pemerintah dan masyarakat	14 ha setara 70.000 pohon mangrove
Jumlah total luasan konservasi			196,02 hektar

Tabel. 3.7 Program Pendukung IKU 3 Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitas

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	889,481,417	837,206,623	94.12
2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	104,421,268	75,317,637	72.13

KSD yang mendukung IKU NBM adalah KSD 46 yaitu Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi dengan 5 rencana aksi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Renaksi KSD Pendukung IKU 3 Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitas

NO. KSD	NAMA	RENAKSI	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	
KSD 46	Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Pusat Konservasi Ekologi	1	Peningkatan luasan area konservasi dan rehabilitasi melalui transplantasi karang dan fish shelter	100	100
		2	Peningkatan keterampilan dan pembinaan masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi	100	100
		3	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka konservasi ekosistem terumbu karang di area DPLBM Kepulauan Seribu	100	100
		4	Menjadikan Pulau Tidung Kecil sebagai pusat informasi dan edukasi konservasi ekologi laut	100	100
		5	Pelaksanaan webinar terkait Kepulauan Seribu	100	100

d. Capaian IKU 4 (Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran)

Realisasi IKU 4 yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar 93,02 % dari target 91% dengan capaian sebesar 102,22 %. Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan kota sebagai program penunjang operasional.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran 80% dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$$

2. Serapan Anggaran <80% dan output <100%

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

3. Serapan Anggaran 80%, namun output <100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Tabel. 3.9 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

NO	NAMA PROGRAM	APBDP	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	258,095,016,534	242,312,183,646	93.88
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,558,408,975	15,743,228,921	95.08
	TOTAL	274,653,425,509	258,055,412,567	93.96

Tabel. 3.10 Perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT	JUMLAH
1	2	3	4	5 =3X4
1	Penyerapan Anggaran	93.96	40.00%	40.00%
2	Efisiensi Anggaran	6.04	10.00%	3.02%
3	Pencapaian Output	100.00	50.00%	50.00%
	REALISASI			93.02%
	CAPAIAN			102.22%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel. 3.11 Sub Kegiatan Pendukung IKU 4 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

NO.	SUB KEGIATAN
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9	Penyediaan Bahan/Material
10	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

e. Capaian IKU Penunjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja (Sasaran Khusus dan Operasional)

Tabel. 3.12 Perjanjian Kinerja Penunjang IKU

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
SASARAN KHUSUS						
1	Terpantainya harga pangan strategis	Indeks Harga Konsumen (volatile food)	Indeks	133	105.25	100.00
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe III/IV	Paket	8	3	37.50
3	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persentase	100%	100%	100.00
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	WTP	3 (WTP)	3	100.00
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Persentase	100%	100%	100.00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Predikat	A (81)	91.94	100.00
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB	Nilai	92	96.06	100.00
8	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Rupiah	35,538,000,000	128,308,110,000	100.00
9	Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Persentase capaian omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	Persen	100	100	100.00
SASARAN OPERASIONAL						
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase	100%	100%	100.00
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Indeks	100%	100%	100.00
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase	100%	92%	92.00

3.1.3. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2021.

Tabel. 3.13 Capaian IKU sesuai capaian RPJMD

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks				70				78,89
	Ketersediaan Pangan	Persentase	100	100	100		100	100	100	
	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	-	82	83			88,3	88,2	
2	Neraca Bahan Makanan	Persentase				100				100
3	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Luas (Ha)		141,9	142,4	144,2		143.200	143.687	196,02
4	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase			100	91			89.66	93,02

3.1;4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	110	51.63	48.37
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan	100	32.22	67.78
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	110	91.81	8.19
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	102.21	95.53	4.47

Tabel. 3.15 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

No.	Sasaran Strategis	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021			No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70	78.89	110.00		PROGRAM YANG Mendukung NBM DAN PERSENTASE KUALITAS ANGGARAN	896,132,676,103	462,644,899,390	51.63
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan	Persen	100	100	100.00	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	606,785,380,440	186,922,362,183	30.81
							2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,157,463,747	1,134,988,933	98.06
							3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5,140,854,968	4,728,544,361	91.98
							4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	86,981,000	85,181,000	97.93
							5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,243,407,154	1,236,383,340	99.44
							6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,268,379,255	4,440,236,266	84.28
							7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,356,569,831	1,299,600,996	95.80
							8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60,252,500	60,038,000	99.64
							9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	379,961,699	358,253,360	94.29
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha	144.2	196.02	110	1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	889,481,417	837,206,623	94.12
							2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	104,421,268	75,317,637	72.13
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	93.02	102.22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274,653,425,509	262,379,310,951	95.53

3.1.5. Perbandingan Dengan Target Nasional

Tabel. 3.16 Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020 beberapa Daerah di Indonesia

Peringkat	Nama Provinsi	IKP	Peringkat	Nama Provinsi	IKP
1	Bali	84,54	18	Banten	73,48
2	Jawa Tengah	82,31	19	Kalimantan Tengah	72,58
3	Sulawesi Selatan	81,81	20	Kalimantan Utara	71,90
4	DI Yogyakarta	80,67	21	Sumatera Utara	71,84
5	Gorontalo	80,40	22	Kep. Bangka Belitung	71,21
6	Kalimantan Selatan	80,04	23	Kalimantan Barat	71,13
7	Jawa Timur	79,90	24	Aceh	70,92
8	Sumatera Barat	78,64	25	Bengkulu	70,28
9	Kalimantan Timur	78,24	26	Jambi	70,00
10	DKI Jakarta	77,97	27	Sumatera Selatan	68,67
11	Sulawesi Utara	77,79	28	Nusa Tenggara Timur	66,92
12	Lampung	77,43	29	Riau	64,12
13	Sulawesi Tenggara	77,06	30	Maluku Utara	63,12
14	Jawa Barat	76,78	31	Kepulauan Riau	62,70
15	Sulawesi Barat	76,36	32	Maluku	58,15
16	Nusa Tenggara Barat	75,60	33	Papua Barat	49,40
17	Sulawesi Tengah	75,10	34	Papua	34,79

14 Indeks Ketahanan Pangan

Pada tahun 2020 capaian Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi DKI Jakarta secara nasional berada pada peringkat 10 dengan nilai IKP sebesar 77,97. Sedangkan pada tahun 2021 capaian IKP di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan sehingga capaian IKP menjadi sebesar 78,89. Nilai IKP tersebut merupakan perhitungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dengan data-data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait. Namun secara nasional capaian nilai IKP belum di release oleh Badan Ketahanan Nasional mengingat penyampaian angka IKP secara nasional adalah pada semester 1 pada tahun berikutnya. Sehingga tahun 2021 nilai IKP Provinsi DKI Jakarta belum dapat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebagai berikut ini :

Tabel. 3.17 Realisasi Anggaran Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020

NO.	SKPD	Tahun 2020				Tahun 2021			
		Jumlah Program	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian	Jumlah Program	Pagu APBDP	Realisasi	Capaian
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	10	111,347,366,703	100,213,317,933	90.00	12	897,126,578,788	463,557,423,650	51.67

Realisasi Anggaran Tahun 2021 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 DKPKP mendapatkan Amanah untuk pelaksanaan anggaran subsidi pangan murah bagi masyarakat tertentu dimana pada tahun 2021 dengan kondisi Pandemi Covid 19 terjadi perubahan pola penggunaan penerima KJP terhadap belanja barang subsidi pangan.

Tabel. 3.18 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN 2021		
		PAGU APBDP	REALISASI ANGGARAN	Persentase
1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,157,463,747	1,134,988,933	98.06
2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	104,421,268	75,317,637	72.13
3	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	889,481,417	837,206,623	94.12
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5,140,854,968	4,728,544,361	91.98
5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60,252,500	60,038,000	99.64
6	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,356,569,831	1,299,600,996	95.80
7	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	86,981,000	85,181,000	97.93
8	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	606,785,380,440	186,922,362,183	30.81
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274,653,425,509	262,379,310,951	95.53
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,268,379,255	4,440,236,266	84.28
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,243,407,154	1,236,383,340	99.44
12	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	379,961,699	358,253,360	94.29
	TOTAL	897,126,578,788	463,557,423,650	51.67

Realisasi APBD Perubahan Tahun 2021 sebesar Rp. 463.557.423.650,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 897.126.578.788 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 51,57 %.

Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 30,81%. Hal ini disebabkan pada Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang merupakan Penyediaan Subsidi Pangan dengan Harga Murah hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 185.772.889.900,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 605.610.000.000,- atau sebesar 30,68%. Rendah penyerapan anggaran subsidi pangan murah tersebut dikarenakan 80% penerima manfaat lebih memilih membelanjakan dananya (KJP, Kartu Lansia, dll) untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun turunnya pemanfaatan pangan bersubsidi oleh penerima manfaat disebabkan :

1. Penarikan dana KJP Plus secara tunai (Pergub KJP Plus No.46/2020 Ps 34A (80% sasaran ad siswa KJP)
2. Poin 1 korelasi positive dg hasil survey 78% penerima manfaat mempergunakan dana bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari
3. Terbatasnya lokasi distribusi (lingkup PsJaya, DJ dan FS)

Tabel. 3.19 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No	Program	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	12,837,632,089	12,481,298,053	97.22
2	Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	497,198,000	449,550,400	90.42
3	Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	3,495,938,705	3,321,117,124	95.00
4	Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan	1,734,852,545	1,430,025,599	82.43
5	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan	67,795,949,333	58,313,022,848	86.01
6	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan	1,012,945,666	991,537,005	97.89
7	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan	13,804,870,772	13,235,960,634	95.88
8	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan	148,266,900	146,562,200	98.85
9	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian	9,977,424,513	9,806,051,470	98.28
10	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian	42,288,180	38,192,600	90.32
Total		111,347,366,703	100,213,317,933	90.00

Tabel. 3.20 Program Penunjang Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2021			No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70	78.89	110.00		PROGRAM YANG Mendukung NBM DAN PERSENTASE KUALITAS ANGGARAN	896,132,676,103	462,644,899,390	51.63
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	Neraca Bahan Makanan	Persen	100	100	100.00	1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	606,785,380,440	186,922,362,183	30.81
							2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1,157,463,747	1,134,988,933	98.06
							3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5,140,854,968	4,728,544,361	91.98
							4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	86,981,000	85,181,000	97.93
							5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,243,407,154	1,236,383,340	99.44
							6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5,268,379,255	4,440,236,266	84.28
							7	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,356,569,831	1,299,600,996	95.80
							8	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60,252,500	60,038,000	99.64
							9	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	379,961,699	358,253,360	94.29
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota berkelanjutan dan lestari	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha	144.2	196.02	110	1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	889,481,417	837,206,623	94.12
							2	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	104,421,268	75,317,637	72.13
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	93.02	102.22	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274,653,425,509	262,379,310,951	95.53

DINAS
KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN
PERTANIAN
DKI JAKARTA



BAB

Penutup

4



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
2021

BAB IV

PENUTUP

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan 3 urusan yaitu pangan, pertanian kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan program ketiga urusan tersebut secara garis besar telah mencapai target dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang perlu dirumuskan strategi baru sebagai solusi pada tahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan meliputi 4 sasaran strategis.
3. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja, 4 indikator sudah mencapai target dengan kriteria capaian sangat baik.
4. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana;

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan permasalahan dan alternatif solusi sebagaimana diuraikan pada Bab III serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP perlu dibentuk tim khusus yang menangani SAKIP lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
2. Perlunya meningkatkan pemahaman dan penerapan SAKIP di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
3. Perlunya pengembangan kolaborasi seluas-luasnya diantaranya melalui inventarisasi kolaborator yang merupakan salah satu upaya alternatif untuk mencapai target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
4. Mendorong UKPD lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian agar melakukan penjajakan dan pelaksanaan kolaborasi dengan berbagai pihak;
5. Tetap berkomitmen untuk mempertahankan program-program yang telah dicapai secara maksimal diantaranya Jakarta Bebas Rabies;
6. Lebih meningkatkan pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik secara tatap muka maupun virtual sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam rangka mendorong penumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah pesisir laut melalui DPL-BM;
8. Meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diantaranya pelayanan Kesehatan hewan, DO bibit tanaman, pengujian bahan pangan segar baik pertanian, peternakan dan perikanan.
9. Mencari strategi dan solusi dalam mengoptimalkan program subsidi pangan murah bagi masyarakat tertentu.
10. Mengusulkan revisi Pergub No. 46 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.

Lampiran - Lampiran



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
2021**

Lampiran I

Realisasi Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

NO	Program	Indikator	Satuan	TAHUN 2021		Persentase	Interpretasi
				TARGET	REALISASI		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	Indeks	4	4.00	100.00	Sangat Tinggi
2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	%	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88	86.30	98.07	Sangat Tinggi
4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya	%	96	99.93	104.09	Sangat Tinggi
5	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas perairan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	Ha	1	1.1575	115.75	Sangat Tinggi
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	ton	114,320.00	155,787.53	136.27	Sangat Tinggi
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan Hias	Ekor	16,619,000.00	16,642,502.00	100.14	Sangat Tinggi
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	35,982,600.00	48,372,346.00	134.43	Sangat Tinggi
9	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelanggaran	65	69	106.15	Sangat Tinggi
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan	Ton	6,827.57	16,057.47	235.19	Sangat Tinggi
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	43,725.00	100,346.01	229.49	Sangat Tinggi
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi benih padi	Ton	47.2	47.22	100.04	Sangat Tinggi
13	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi susu	liter	5,050,000.00	5,934,210.00	117.51	Sangat Tinggi
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah produksi daging	kg	35,112,000.00	43,426,680.00	123.68	Sangat Tinggi

NO	Program	Indikator	Satuan	TAHUN 2021		Persentase	Interpretasi
				TARGET	REALISASI		
15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	ekor	10,000.00	20,409.00	204.09	Sangat Tinggi
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lokasi pengembangan kegiatan urban farming	Lokasi	320	400	125.00	Sangat Tinggi
17	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	kasus	0	0	100.00	Sangat Tinggi
18	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax)	kasus	9	2	100.00	Sangat Tinggi
19	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah sertifikasi kesehatan masyarakat veteriner	Sertifikasi	41	26	63.41	Rendah
20	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan hama dan penyakit tanaman	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
21	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian	ton	114	205.76	180.49	Sangat Tinggi
22	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan	ton	9,500.00	12,714.00	133.83	Sangat Tinggi
23	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1,593.00	2,906.70	182.47	Sangat Tinggi
24	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	40	41.9	104.75	Sangat Tinggi
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan	Lokasi	8	8	100.00	Sangat Tinggi
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah pelanggaran bidang peternakan	Kasus	5	5	100.00	Sangat Tinggi
27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias	Rupiah	31,500,000,000	60,955,156,000	193.51	Sangat Tinggi

Sumber : DKPKP



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHARINI ELIAWATI

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta,

SUHARINI ELIAWATI
NIP 196810011995032005

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Suharni Eliawati
 NIP : 196310011985032005
 Jabatan : Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta


Nama : Suharni Eliawati
 NIP : 196310011985032005
 Jabatan : Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

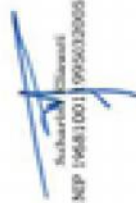
NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengkukuran Kinerja				Tahunan
					I	II	III	IV	
SASARAN STRATEGIS									
1	Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	70	70
2	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjangkau, memadai dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat	1	Neraca Bahan Makanan	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	100%	100%
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai penguji kota berkelanjutan dan lestari	1	Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	144,2	144,2
4	Terwujudnya tata kota pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	91%	91%
<p>Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, ketangguhan akses pangan dan pemantauan pangan. Target 2020-2022 mengacu pada realisasi IKP yang dikis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Tahun 2019 sebesar 66,87.</p> <p>Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah merupakan salah satu alat untuk mengetahui kondisi penyediaan dan penguraian pangan di suatu wilayah baik lingkup Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Negara. Neraca Bahan Makanan (NBM) memuat informasi mengenai produksi pangan, stok pangan, ekspor impor, pangon, penguraian untuk industri dan non industri hingga pakan, baik serta pangan ternak. Dengan melalui analisis NBM maka dapat dianalisis apakah suatu pangan yang tersedia di suatu wilayah sudah mencukupi sesuai dengan standar Quantity dan Quality</p> <p>Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi dengan cara transplanasi, penenggalaman fish shelter, dan menciptakan masyarakat yang cinta bahari.</p> <p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen, yaitu:</p> <p>a. Penyelesaian Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyelesaian anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran minimal 40% apabila serapan anggaran ≥ 80%. Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diprioritaskan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang lampai sasarnya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dikur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PDUJ/PD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran ≥ 80% dan output 100% Realisasi = (40%) + [(%efisiensi X 10%)/20%] + (50%)</p> <p>2. Serapan Anggaran < 80% dan output < 100% Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)</p> <p>3. Serapan Anggaran ≥ 80% namun output < 100% Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>									

5	Terjadinya akses dan layanan berkualitas, kepastian, dan peningkatan keberdayaan yang dirasakan bagi semua	1	Penyerasan penyediaan rencana aksi penyediaan jaminan kesehatan yang bermutu dan integratif (nomor 13)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyediaan rencana aksi penyediaan jaminan kesehatan yang bermutu dan integratif (nomor 13)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terjadinya tM kebutuhan jejaring yang legowo, linier dan mulya serta terdapat bagi masyarakat	1	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi peningkatan mutu layanan melalui peningkatan ketersediaan Pangan Berbasis IT, Pendidikan Berbasis Pemas, dan Penyerasan Sistem Pengendalian Pangan, dan Penyerasan Produk Pangan (nomor 14)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyerasan rencana aksi Program Peningkatan dan Pengembangan Ketersediaan Pangan (nomor 21)	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya ketersediaan baru	1	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi Program Ketersediaan dan Pengembangan Ketersediaan Pangan (nomor 22)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyerasan rencana aksi Pengembangan dan Peningkatan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya akses layanan layak	1	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi peningkatan dan Peningkatan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyerasan rencana aksi Meningkatkan Mutu dan Kualitas Air (nomor 23)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terjadinya tata laksana pemerintahan dan layanan Daerah yang terintegrasi dan sinergis	2	Penyerasan capaian rencana aksi peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi dibandingkan dengan target rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	N/A	100%	100%	100%	100%
10	Terjadinya tata laksana pemerintahan yang terintegrasi dan sinergis serta meningkatkan keberdayaan masyarakat	1	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi Peningkatan Kapasitas Serta sebagai Pital Konservasi (bagi) (nomor 46)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyerasan rencana aksi Meningkatkan Kapasitas Serta sebagai Pital Konservasi (bagi) (nomor 46)	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi Peningkatan Kapasitas Serta sebagai Pital Konservasi (bagi) (nomor 46)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyerasan rencana aksi Meningkatkan Kapasitas Serta sebagai Pital Konservasi (bagi) (nomor 46)	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terjadinya tata laksana pemerintahan dan layanan yang terintegrasi dan sinergis serta meningkatkan keberdayaan masyarakat	1	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyerasan dibandingkan target penyerasan rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100%	100%	100%	100%	100%
12	Terjadinya tata laksana pemerintahan yang terintegrasi dan sinergis serta meningkatkan keberdayaan masyarakat	1	Penyerasan capaian penyerasan rencana aksi Adaptasi Rencana (nomor 67)	e-Monev KSD	Realisasi rencana aksi KSD rencana Monev dan Adaptasi Rencana (nomor 67)	100%	100%	100%	100%	100%

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SALAH SAKU KUALITAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terdapatnya harga pangan strategis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mengapainya Perencanaan Masyarakat dalam Pengembangan Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mengapainya Pemantauan E-Perilaku dalam Pengembangan Barang dan Jasa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terdapatnya atau tidak pemantauan dan pengawasan daerah yang terdapat dan akurat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terdapatnya secara strategi komunikasi publik untuk program-program umum dan kegiatan Perangko Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terdapatnya atau tidak pemantauan yang terdapat dan akurat Provinsi DPO Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mengapainya atau tidak pemantauan dan pengawasan yang akurat produksi dan kegiatan ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

20	Meningkatkan ketermampuan yang berdaya saing	1	Luaran konsep yang dihasilkan oleh pelaku usaha/instansi/organisasi (UP/IO) di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat di dalam sistem Aksepro	e-Kinerja Tm : 0% TW I : 10% TW II : 20% TW III : 40%	Jumlah konsep yang dihasilkan oleh pelaku usaha/instansi/organisasi (UP/IO) di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terdapat di dalam sistem Aksepro Aksepro Target Dinet per Provinsi	1.376.000.000	3.653.800.000	12.458.000.000	17.799.000.000	26.538.000.000
SALINAN OPERASIONAL										
21	Terselenggaranya Tingkat Layanan Anjuran Gubernur	1	Penyediaan layanan penyelesaian Tindakan Lanjut Anjuran Gubernur	e-Kinerja	Luaran Realisasi TL Anjuran Gubernur (reguler, e-office online melalui media elektronik), dan bentuk anjuran lainnya / Jumlah TL Anjuran Gubernur x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Penyediaan layanan penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Luaran Realisasi TL Aduan Masyarakat / Jumlah TL Aduan Masyarakat x 100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Terselenggaranya tingkat tingkat rekomendasi benur hasil kontribusi pelayanan (SPK)	1	Penyediaan proses penyelesaian tingkat tingkat rekomendasi benur hasil jemberhuan pelayanan (SPK)	e-Kinerja	Luaran rekomendasi LHP SPK RI tahun 2020 dan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan UP/IO sebagai koordinator/jumlah seluruh rekomendasi LHP SPK RI yang diterima tahun 2020 dan sebelumnya x 100% (Melalui e-kelektoran)	25%	25%	25%	25%	100%

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Anwar Hidayat, Ph.D

Jakarta, 30021
Plt. Kepala Dinas Kerejasama Program, Kolaborasi dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,

Subandi
NIP 196810011995032005

PENGHARGAAN TAHUN 2021

1. Juara 1 Lomba Puskeswan

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan telah meraih juara 1 lomba Puskeswan terbaik Nasional tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Pemberian penghargaan disampaikan pada tanggal 26 Oktober 2021 di Solo Jawa Tengah.



2. Penghargaan dan Apresiasi atas kawasan Peternakan sapi perah Pondok Rangun sebagai lokasi pilot project green financing Biokonversi Maggot BSF Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD DKI Jakarta.



3. Penghargaan dan Apresiasi atas Rumah Potong Hewan Unggas Rawa Kepiting sebagai lokasi pilot project green financing Biokonversi Maggot BSF Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan TPAKD DKI Jakarta. Apresiasi



4. Penghargaan sebagai Penyuluh Pertanian ASN Teladan yang diberikan kepada M. Ramdani penyuluh pertanian wilayah Jakarta Utara. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

